

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, A. d. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- J.A.Hehanussa, D. D. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Khozim, M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Mamuji, S. S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mashuriyanto, S. d. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi ed.). Bandung: Rosdakarya.
- Nukilan, W. (2003). *Metode Penelitian Hukum* (Cet.1 ed.). Jakarta: Tim Pengajar.
- Soekanto, S. (1990). *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Indonesia Hillco.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulasno, R. &. (2021, Desember). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Suroso, F. L. (n.d.). *Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD*. Pusdik MK RI. Retrieved April 12, 2024
- Syahuri, T. (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Abdurrahman Alhakim, E. G. (2021, Februari). Analisis Pembentukan Undang - Undang Cipta Kerja Pada Tahapan Perencanaan dan Penyusunan berdasarkan Undang -Undang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. *Jurnal Combines*, 1(1).
- Amini, N. (2022, Agustus). Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dikaitkan Dengan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel*, 5(1).
- Amith, K. (2023, Juni). Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Syntax Idea*, 5(6).
- Anggraeni, R. (2019, Juli). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar secara ideal dalam Pembentukan Undang Undang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(3).
- Antariksa, B. (2017). Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Deliberatif*, 1(1).

- Aziz, M. (2010, Oktober). Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5).
- Chandra, d. M. (2022, Maret). Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1).
- Chandranegara, I. S. (2016). Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(3).
- Hirma, S. (n.d.). Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja. *Journal of Constitutional Law*, 3(1).
- Ihsanul Maarif, F. A. (2020, Oktober). Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Litigasi*, 23(2).
- Indra, d. M. (2023). Strength Of Constitutional Court Decisions Injudicial Review Of The 1945 Constitution In Indonesia. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2).
- Lesmana, d. T. (2023, Januari). Pembaruan Hukum Mengenai Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen UUD 1945. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Marzuki, L. (2018). Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(3).
- Masnum, D. M. (2023, Juli). Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Nasution, A. B. (2023, November). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *Jurnal USM Law Review*, 6(3).
- Nurhayati, S. (2015, Oktober). Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2).
- Panagaribuan, d. R. (2023, Agustus). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*, 11(5).
- Parkesit, R. A. (2021, Desember). Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi*, 18(4).
- Rahmatullah, I. (2013, Desember). Rejuvenasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2).
- Sajian, d. A. (2021, Desember). Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja political Impact On The Establishment Of Draft Of Job Creation Bill. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).
- Samosir, D. (2005). Faktor-faktor yang menyebabkan Materi Muatan Undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. The factors that makes the content in law contradiction The 1945 Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Saraswati, R. (2013, September-Desember). Problematika Hukum Undang-Undang

- No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3).
- Sartika, S. D. (2020, Februari). Politik Hukum Undang-undang Cipta Kerja. *Jurnal Bidang Hukum*, XII(4).
- Satria Rangga Putra, S. (2022, Juni). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Terkait Pengujian Formil Uu Cipta Kerja: Perspektif Hukum Progresif: Reviewing Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Regarding Formal Review of Job Creation Act: A Progressive Law Persp. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(2).
- Siallagan, H. (2016, Juli). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(2).
- Simamora, J. (2014, September). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3).
- Wicaksono, D. A. (2023, Juni). Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2).
- Yunaldi, W. (2018, Januari). Judicial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Pagaruyuang Law Jurnal*, 1(2).

Website Online

- Arfana, N. T. (n.d.). *UU Cipta Kerja Dituding Jadikan Pendidikan Sebagai Ladang Bisnis*. Diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16739&menu=2> pada 25 Mei 2024
- Badan Legislasi DPR RI. (2009). Kinerja dan Evaluasi 2005-2009.
- Hutabarat, D. (n.d.). *Banyak versi RUU Cipta kerja, Pimpinan DPR: Substansi tidak ada yang berubah*. Liputan 6.com. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4381364/banyak-versi-ruu-cipta-kerja-pimpinan-dpr-substansi-tidak-ada-yang-berubah> pada 19 Mei 2024
- Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_hukum_prioritas_perundang-undangan.pdf pada 23 April 2024
- Mardatih, A. (n.d.). *Jimly: Jika masih Hakim MK, 1000 Persen saya kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja*. Hukum Online. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--jika-masih-hakim-mk--1000-persen-saya-kabulkan-uji-formil-uu-cipta-kerja-lt5fa4f9409448e/> pada 19 Mei 2024
- Meiliana, T. M. (n.d.). *UU Cipta Kerja sudah disahkan, tapi Baleg sebut belum ada naskah final*. Kompas.com. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/11474311/uu-cipta-kerja-sudah-disahkan-tapi-baleg-sebut-belum-ada-naskah-final?page=all> pada 18 Mei 2024
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Dikases dari
https://bphn.go.id/data/documents/perubahan_uu_no_12_tahun_2011.pdf
pada 23 April 2024
PPN/Bapenas, B. H. (2011). Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi
Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan
(Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta:
Kementrian PPN/Bapenas. Diakses dari
[https://www.slideshare.net/JosephSitepu/draft-policy-paper-13juli-
menilai-naskah-akademik-penyusunan-aturan-pada-23-April-2024](https://www.slideshare.net/JosephSitepu/draft-policy-paper-13juli-menilai-naskah-akademik-penyusunan-aturan-pada-23-April-2024).

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
beserta perubahannya.

UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Lampiran Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Undang Nomor 12
Tahun 2011